

Harmony Then Divorced: The Dynamics of the Relationship between the Student Movement and the New Order in 1966-1980

Haidar Trisna Tanaya^{a*}

^aSMP Ibu Kartini Semarang, Semarang, Indonesia

*haidartanaya1945@gmail.com

Abstract

The Student Movement has a long history since back to colonial times. The Student Movement is formed from students who have thoughts of change which then form a movement to make corrections, criticisms and changes in the social, political and government fields. The Student Movement during the New Order was seen as being in a depressed position, but on the other hand, in fact the Student Movement had a good relationship with the New Order at the beginning of the New Order. The Student Movement can be said to have contributed to the birth of the New Order through demonstrations, one of which was the Tritura action in 1966. The formation of a harmonious relationship between the Student Movement which was known to be critical and the militaristic New Order did not happen suddenly, but there were several factors that contributed to it. behind it. This study tries to analyze and reveal the factors that caused the Student Movement to have a harmonious relationship with the New Order while at the same time revealing the causes of the harmonious relationship rift that caused the Students and their Movement to experience extraordinary repression and intervention from the New Order.

Keywords: Student Movement, Old Order, New Order, Relation, Demonstration

Harmoni yang Berujung Perceraian: Dinamika Hubungan antara Gerakan Mahasiswa dan Orde Baru pada 1966–1980

Abstrak

Gerakan Mahasiswa memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman kolonial. Gerakan Mahasiswa terbentuk dari Mahasiswa yang memiliki pemikiran akan perubahan yang kemudian membentuk suatu gerakan untuk melakukan koreksi, kritikan dan perubahan baik dalam bidang sosial, politik dan pemerintahan. Gerakan Mahasiswa pada masa Orde Baru dipandang berada pada posisi yang tertekan, namun di sisi lain pada kenyataannya Gerakan Mahasiswa memiliki hubungan yang baik juga dengan Orde Baru pada awal berdirinya Orde Baru. Gerakan Mahasiswa dapat dikatakan memiliki sumbangsih dalam melahirkan Orde Baru lewat aksi demonstrasi, salah satunya aksi Tritura pada tahun 1966. Terbentuknya hubungan yang harmonis antara Gerakan Mahasiswa yang dikenal kritis dengan Orde Baru yang bersifat militeristik bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan Gerakan Mahasiswa dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Orde Baru sekaligus

mengungkapkan sebab terjadinya keretakan hubungan yang harmonis tersebut sehingga menyebabkan Mahasiswa dan Gerakannya mengalami represi dan intervensi yang luar biasa dari Orde Baru.

Kata Kunci: Gerakan Mahasiswa, Orde Lama, Orde Baru, Relasi, Demonstrasi

Pendahuluan

Orde Baru dan Mahasiswa seakan tidak bisa dipisahkan begitu saja, keduanya dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Tak bisa disangkal, Orde Baru sendiri berdiri atas bantuan dari Gerakan Mahasiswa tahun 1966 (Angkatan 66) yang waktu itu berhasil mendorong tumbang rezim Sukarno. Watak gerakan mahasiswa yang mampu membawa perubahan yang cepat menjadi kendaraan politik instan yang dipakai oleh Orde Baru untuk naik ke tampuk kekuasaan.

Sejarah mencatat peranan Mahasiswa dalam beragam perubahan, baik di dalam masyarakat maupun di pemerintahan serta berbagai bidang. Gerakan Mahasiswa sendiri timbul dari pemikiran dialektis para mahasiswa yang memiliki kepekaan baik terhadap kondisi politik, ekonomi maupun sosial masyarakat. Gerakan Mahasiswa dengan pola-pola gerakannya serta massa yang dibawa telah membawa perubahan penting dalam tatanan politik di Indonesia. Gerakan Mahasiswa sebagai sebuah gerakan pembaharuan dan perubahan memiliki akar sejarah yang cukup Panjang sehingga dapat ditarik sampai masa kolonial. Gerakan Mahasiswa tidak surut setelah lahirnya Indonesia, tercatat terdapat dua gerakan mahasiswa besar yang sama-sama berhasil merubah tatanan pemerintahan, yaitu Gerakan Mahasiswa 1966 dan Gerakan Mahasiswa 1998 (Widyarsono et al., 2011, p. 1).

Gerakan Mahasiswa memainkan peranan penting dalam meruntuhkan Orde Lama dan membawa Orde Baru meraih kekuasaan yang menjadi tanda adanya hubungan erat dengan Orde Baru pada awal berdiri. Eratnya hubungan antara Gerakan Mahasiswa tahun 1966 dengan Orde Baru juga tergambar dalam naiknya beberapa tokoh pergerakan untuk menjadi wakil-wakil di Parlemen. Orde Baru tercatat masih menerima relasi kemitraan dengan Gerakan Mahasiswa hingga tahun 1970-an hingga akhirnya setelah tahun 1975 Rezim Orde Baru mulai bersikap keras terhadap Gerakan Mahasiswa, terutama dengan diterbitkannya NKK BKK oleh Menteri Daoed Joesoef.

Pendidikan Tinggi tak bisa diabaikan begitu saja dalam periode antara tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Pengaruh politik di pusat beberapa kali mempengaruhi arah gerak dan kinerja dari Perguruan Tinggi. Tahun 1960-an atau masa Orde Lama, Perguruan Tinggi benar-benar terpengaruh dengan kekuatan politik bahkan Presiden Sukarno sendiri menekan kan kampus atau perguruan tinggi untuk berpolitik praktis seperti menggelorakan Manipol Usdek. Perguruan Tinggi juga menjadi ajang pertarungan politik antara Pro Sukarno dan Anti Sukarno pada periode yang sama. Kegiatan politik praktis di dalam kampus ini kemudian tiba-tiba dipaksa berhenti oleh pemerintah Orde Baru sekitar pada tahun 1975-1978 sebagai bentuk implementasi kebijakan NKK BKK.

Penelitian serupa mengenai gerakan mahasiswa, Orde Lama dan Orde Baru sudah cukup banyak. baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi. Penelitian mengenai Gerakan Mahasiswa pernah diteliti dalam jurnal berjudul *Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974*. Penelitian tersebut membahas mengenai dunia pers mahasiswa yang tidak bisa dipisahkan dengan dunia Gerakan Mahasiswa. Pers pada masa awal Orde Baru sempat diizinkan dan dibuka selebarnya sebagai sebuah anti tesis politik Orde Lama yang mengekang pers. Keadaan ini kemudian berbeda

Ketika tahun 1974 ketika Orde Baru kemudian menekan Pers, terutama pers yang menjadi corong suara Mahasiswa dalam berpolitik di kampus. Penelitian ini hanya memfokuskan pers sebagai fokus penelitian dan belum menyentuh ranah Gerakan Mahasiswa dan Politik di Kampus.

Penelitian lainnya yang meneliti mengenai Gerakan Mahasiswa adalah jurnal yang berjudul *Gerakan Mahasiswa dan Kebijakan NKK/BKK Tahun 1978-1983*. Penelitian tersebut membahas pola Gerakan Mahasiswa masa Orde Baru sebelum adanya kebijakan NKK/BKK dan sesudah kebijakan tersebut disahkan dan diimplementasikan. Penelitian ini juga membahas pengaruh peristiwa MALARI terhadap lahirnya kebijakan NKK/BKK. Penelitian ini meskipun telah membahas Gerakan Mahasiswa dan lahirnya NKK/BKK, namun belum membahas hubungan Gerakan Mahasiswa dengan Orde Baru dan pengaruh politik Orde Baru terhadap lahirnya NKK/BKK.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan seputar Gerakan Mahasiswa pada Masa Orde Baru dengan rentang waktu 1966-1980. Rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latarbelakang tersebut yaitu: Bagaimana Dinamika Hubungan Gerakan Mahasiswa pada Masa Orde Baru tahun 1966-1980? Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengungkapkan hubungan Gerakan Mahasiswa pada Masa Orde Baru yang mengalami perubahan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia keilmuan dan akademik serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa serta khalayak umum dalam memahami dinamika hubungan Mahasiswa, Politik, dan Orde Baru.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (Heuristik), Kritik Sumber, Interpretasi (Telaah Sumber) dan Historiografi (Penulisan Sejarah). Tahap Heuristik adalah tahap pengumpulam sumber, di mana sumber sejarah yang ada baik primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber pustaka seperti arsip dan penelitian yang sudah dilakukan. Sumber-sumber yang telah didapat kemudian dilakukan kritik sumber untuk menjamin validitas dan kredibilitasnya. Sumber yang telah dipilih kemudian diinterpretasikan atau ditelaah oleh peneliti dengan menafsirkannya sehingga dapat digunakan dalam tahap selanjutnya yaitu penulisan sejarah (historiografi) (Kuntowijoyo, 2013, pp. 73–82).

Hasil dan Pembahasan

Situasi Sosial-Politik dan Ekonomi Masa Orde Lama

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama Sukarno memberikan pengaruh cukup kuat dalam mendorong terbentuknya aliansi antara mahasiswa dengan kelompok yang membentuk Orde Baru. Tahun 1959 Sukarno menerbitkan dekrit 5 Juli 1959, di mana dekrit tersebut mengakhiri masa Demokrasi Liberal dan memulai pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang otoriter. Sukarno merasakan adanya ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal. Konsep Demokrasi Terpimpin

digunakan Sukarno untuk memandu kekuatan Politik Gotong Royong guna mencapai tujuan dan persatuan nasional. Demokrasi Terpimpin kemudian dimanifestasikan dalam peta kekuatan politik yang terbagi menjadi tiga yang masing-masing mewakili poros kekuatan, yaitu Sukarno mewakili poros pemerintah, PKI mewakili poros partai serta sipil, dan Angkatan Darat yang mewakili poros militer (Sholehuddin & Kasdi, 2015, p. 73).

Demokrasi Terpimpin menjadi semacam solusi bagi carut marutnya kondisi politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin menjadikan kepemimpinan Sukarno sebagai kepemimpinan yang otoriter dalam membentuk pemerintahan dan mengatur kehidupan politik. Bentuk otoritarianisme Sukarno nampak pada pembubaran parlemen dan pengaturan konsep NASAKOM. Namun, Demokrasi Terpimpin sendiri pada kenyataannya masih menemui problematika karena masih terdapat kekuatan politik lain yang saling tarik menarik, yaitu komunis dan militer (Sidqi, 2008, pp. 41–42).

Sukarno selain menetapkan pemerintahan otoriter juga menetapkan ideologi lain yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Sukarno menempatkan NASAKOM sebagai ideologi yang sejajar dengan Pancasila dengan dasar bahwa NASAKOM merupakan perasan dari Pancasila (Gotong Royong). NASAKOM dibentuk sebagai sebuah solusi dari pertikaian antar partai yang memiliki perbedaan ideologi dengan menjadikannya alat pemersatu dan kerjasama dari tiga ideologi besar, sehingga dapat mencegah adanya pertikaian seperti pada masa demokrasi liberal. Konsepsi NASAKOM secara tidak langsung juga memperkecil adanya konflik yang dapat melakukan kudeta terhadap presiden, dengan kata lain konsepsi NASAKOM secara tidak langsung semakin memperkuat posisi Sukarno sebagai presiden (E. Agustina, 2019, pp. 58–62).

Pembentukan NASAKOM dan penetapan parpol secara sepihak pada dasarnya berdampak pada pembubaran beberapa parpol lain yang dianggap berlawanan dengan pemerintah seperti Masyumi dan PSI. Pendirian NASAKOM tidak serta merta diterima berbagai kalangan, bahkan pihak NU sendiri sebagai wakil agama yang masuk dalam unsur NASAKOM pada awalnya melakukan kritik. Konsep NASAKOM memang menjadi konsep yang dicetuskan oleh Sukarno, namun dalam realisasinya konsep ini menjadi salah satu tuntutan PKI sehingga PKI mendapat keuntungan dari adanya NASAKOM (Abdurakhman et al., 2019, pp. 46–62).

Kehidupan Politik Orde Lama berdampak pula pada kehidupan sosial. Politik Sukarno yang mengedepankan Revolusi Nasional kemudian melahirkan politik komunikasi yang intensif dalam bentuk slogan-slogan yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Slogan-slogan ini berisi indoktrinasi ide-ide Sukarno yang dianggap revolusioner dan melengkapi Pancasila. Slogan ini juga dibentuk dengan tujuan mendorong masyarakat Indonesia memberikan dukungan dan loyalitas terhadap Sukarno yang dianggap menyelamatkan masyarakat dan bangsa Indonesia dari kehancuran. Jargon-jargon politik yang sering dilontarkan oleh Sukarno misalnya “Manipol Usdek” dan “Ganyang Malaysia”. (Sholehuddin & Kasdi, 2015, p. 79).

Berbagai kebijakan pada masa Orde Lama memang memiliki kecenderungan menguntungkan PKI. Kedekatan Sukarno dengan PKI kemudian dimanfaatkan PKI dengan cara mempengaruhi beragam kebijakan dan mengapresiasi pikiran-pikiran Sukarno. PKI memanfaatkan kedekatan dengan Sukarno untuk semakin memperluas dalam membangun basis masa, salah satunya indoktrinasi pikiran-pikiran Sukarno di masyarakat. Kuatnya pengaruh PKI terlihat dalam realitas politik pada masa Orde Lama di mana Sukarno menempatkan PKI

sebagai basis kekuatan politik terbesar ketiga setelah Angkatan Darat dan Sukarno (Sholehuddin & Kasdi, 2015, p. 70).

Kedekatan antara PKI dengan Sukarno terlihat dalam pidato Sukarno dalam ulang tahun ke-45 PKI. Besarnya dukungan serta semakin dekatnya PKI dengan Sukarno tentu menguntungkan posisi PKI yang digunakan untuk menambah basis masa. Pengaruh PKI yang begitu besar bahkan sampai mempengaruhi jalannya pemerintahan, terutama dalam proses legitimasi NASAKOM di mana PKI menyarankan adanya slogan anti NASAKOM berarti anti Pancasila. Besarnya pengaruh PKI menimbulkan gesekan dengan fraksi politik lain terutama fraksi Angkatan Darat. Gesekan ini salah satunya dibuktikan dengan adanya pelarangan aksi mogok kerja yang di bawah dukungan SOBSI (Organ Buruh di bawah PKI) oleh Angkatan Darat. Pihak militer juga sempat membubarkan Kongres PKI pada tahun 1959, walaupun kemudian ditegur oleh Sukarno (Winata, 2017, p. 731).

Kondisi Ekonomi pada masa Orde Lama sangat memprihatinkan. Ekonomi pada masa Orde Lama mewarisi berbagai masalah pada masa Demokrasi Liberal, seperti masalah inflasi, tidak berjalannya perusahaan hasil nasionalisasi, dan ketimpangan pembangunan. Peraturan dan kebijakan ekonomi juga terkesan diskriminatif, misalnya memisahkan ekonomi pribumi dan non pribumi. Politik Orde Lama yang anti barat juga mendorong keterpurukan ekonomi, hal ini dikarenakan akibat kebijakan tersebut Sukarno menolak impor barang dari Barat dengan dalih kebijakan Berdikari. Kebijakan anti impor tersebut berdampak pada kelangkaan barang di Indonesia secara meluas, termasuk kelangkaan pangan. Kelangkaan barang ini juga diperparah dengan rendahnya produksi di dalam negeri (Fahrika & Zulkifli, 2020, pp. 5–7).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama sangat rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Situasi moneter Indonesia juga memburuk di mana Bank Indonesia kehilangan kendali yang berakibat inflasi yang terus naik hingga tahun 1966. Ekonomi Orde Lama juga terbebani dengan hutang yang menumpuk guna menutupi penurunan pendapatan dan pengeluaran yang begitu besar. Pengeluaran Orde Baru yang besar tidak hanya disebabkan Proyek Mercusuar, melainkan juga digunakan untuk membiaya konflik operasi Trikora di Irian Barat, dan politik anti-Nekolim “Ganyang Malaysia” Sukarno (Operasi Dwikora). Percetakan uang terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah guna menutup anggaran yang defisit justru mendorong kenaikan inflasi. (Fakih et al., 2020, p. 175).

Kekacauan dan tidak stabilnya ekonomi pada masa Orde Lama dipengaruhi juga oleh ambisi politik Rezim Sukarno, terutama terkait politik Mercusuar yang mementingkan ego dan prestige Indonesia berdasarkan simbol-simbol tertentu. Rezim Sukarno memiliki keinginan dan ambisi tinggi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros bagi negara-negara NEFOS (New Emerging Forces), sebuah konsep negara dunia ketiga ala Sukarno. Politik Mercusuar secara politik memang dikatakan berhasil dari segi membangun kepercayaan diri bangsa terutama keberhasilan atas pembangunan Monumen Nasional, Senayan, dan Pusat Perbelanjaan Sarinah. Namun, Politik Mercusuar di sisi lain sangat menguras anggaran pemerintah hingga defisit (Yulianti et al., 2021, p. 54).

Perseteruan Politik dan Kondisi Mahasiswa pada Masa Orde Lama

Masa Orde Lama pada nyatanya masih menimbulkan pertikaian yang lain yang diakibatkan perebutan posisi dalam politik keseimbangan Sukarno. Pertikaian ini melibatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan militer dan PKI sebagai fraksi komunis. Perebutan dan pertikaian mereka terlihat dari dua operasi militer, *pertama* Operasi Trikora yang menjadi ajang menyebarkan pengaruh bagi Angkatan Darat. *Kedua* Operasi Dwikora yang menjadi ajang menyebarkan pengaruh bagi PKI. Persaingan ini kemudian semakin meruncing tatkala Sukarno lebih condong ke arah komunisme dan menjadikan PKI sebagai sekutu politik utama. Sukarno menganggap PKI memiliki loyalitas yang tinggi dan mampu mengerahkan massa yang besar guna memberi dukungan terhadap pelbagai kebijakan Sukarno. Masing-masing pihak baik PKI dan Militer memiliki strateginya masing-masing. PKI memiliki strategi dengan membangun Front Nasional yakni menambah massa lewat berbagai dukungan terhadap politik dan kebijakan Sukarno serta menambah berdirinya cabang partai hingga pelosok. Militer kemudian mengambil strategi memfasilitasi dan membangun jaringan dan kerjasama dengan parpol maupun golongan yang anti PKI (Zuhdi et al., 2021, pp. 174–176).

Pertentangan antara golongan komunis (PKI) dan militer juga merambah ke ranah universitas. Universitas pada masa Orde Lama menjadi medan pertarungan antar ideologi dan fraksi politik. Partai-partai besar pun segera mempengaruhi politik di kalangan mahasiswa. Partai-partai kemudian membentuk organisasi ekstra, misalnya NU yang membentuk IPPNU dan PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), PKI yang membentuk CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), PSI yang membentuk Gemos (Gerakan Mahasiswa Sosialis) dan PNI yang membentuk GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Pembentukan organisasi kemahasiswaan tidak hanya dilakukan oleh partai politik, melainkan juga oleh Angkatan Darat meskipun kurang berhasil dengan membentuk BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer) (Maiwan, 2015, pp. 52–55).

Pergolakan politik pada tahun 1960-an yang sudah masuk ke arena perguruan tinggi menjadikan organisasi mahasiswa yang menjadi *onderbouw* partai tertentu mulai melancarkan aksi perebutan pengaruh di kampus. Memanasnya pertentangan antar gerakan mahasiswa dan semakin masifnya intervensi partai politik di kampus tak bisa dilepaskan dari realita banyaknya perguruan tinggi yang bermunculan, sehingga menambah banyaknya jumlah mahasiswa yang berarti bertambah pula masa politik. Aksi politik paling keras dilakukan oleh fraksi mahasiswa kiri yang dinahkodai oleh CGMI. CGMI sangat gencar menyebarkan pemikiran dan slogan politik Sukarno seperti Manipol Usdek dan NASAKOM. CGMI juga sangat giat dalam menyusup ke berbagai organisasi intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra yaitu PPMI. Manuver CGMI bahkan mencapai titik di mana mereka mulai mengidentifikasi lawan-lawan politik di kampus yang tidak hanya menyasar pada mahasiswa, namun juga para dosen yang dianggap tidak sejalan dengan politik Sukarno. Aksi fraksi gerakan mahasiswa kiri tersebut mendapatkan tanggapan keras dari lawan politiknya seperti HMI dan PMKRI (Maiwan, 2015, pp. 57–60).

Kuatnya pengaruh CGMI di PPMI menyebabkan pergolakan di dalam tubuh PPMI. PPMI bertransformasi dari sebuah organisasi yang menghimpun organisasi mahasiswa ekstra menjadi organisasi tempat perebutan pengaruh dan segmentasi politik mengikuti pola NASAKOM. CGMI mewakili komunis, GMNI anti komunis mewakili Nasionalis, dan HMI serta PMKRI mewakili Pancasila. Perdebatan menjadi hal yang tak bisa dihindari di dalam PPMI terutama terkait isu indoktrinasi, revolusi, dan keikutsertaan PPMI dalam IUS (International

Union Students) yang cenderung beraliran kiri. Perdebatan ini kemudian meruncing tatkala CGMI dan pecahan GMNI yang beraliran kiri berusaha menyingkirkan HMI dari PPMI. Hal ini tentu saja ditentang oleh PMKRI dan GMKI yang berada di pihak Pancasila. CGMI terus menerus mendesak anggota PPMI yang lain bahkan sampai memalsukan hasil rapat guna membubarkan HMI. Perdebatan dan pertentangan di dalam PPMI menimbulkan polarisasi politik-ideologi yang kemudian akan meletus pasca peristiwa Gestapu (Widyarsono et al., 2011, pp. 7-8).

Sukarno memiliki hubungan buruk dengan perguruan tinggi, terutama terhadap akademisi yang kritis dan dianggap kurang menghargai pemikiran Sukarno. Sukarno lebih percaya dengan teori yang bahkan belum teruji daripada mempercayai teori dari para akademisi. Acapkali Sukarno mencap beberapa pengajar di perguruan tinggi sebagai antek imperialisme dan tidak mengenal revolusi kerakyatan. Soe Hok Gie menuliskan "Mereka dituduh sebagai *textbook thinker*, profesor-profesor botak yang tidak dapat mengerti derap revolusi dan lain-lainnya". Hubungan yang buruk antara Sukarno dengan perguruan tinggi berkebalikan dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat telah membina hubungan dengan universitas terutama UI lewat Kerjasama dengan SESKOAD oleh Soewarto. Kerjasama antara SESKOAD dan perguruan tinggi semakin terjalin terutama ketika Sukarno banyak memecat akademisi di kampus karena berseberangan pandangan politiknya. Akademisi tersebut kemudian ditampung ke dalam SESKOAD yang semakin mempererat hubungan perguruan tinggi dengan TNI AD (Gie, 2005, pp. 68-71).

Kerjasama Gerakan Mahasiswa dengan Kelompok Orde Baru tahun 1966-1970

Mahasiswa banyak yang tidak menyukai sikap totaliter dan megalomaniak Sukarno. Adanya sikap ketidaksenangan baik dari kalangan angkatan darat dan mahasiswa terhadap kediktatoran Sukarno kemudian menimbulkan kerjasama. Golongan militer khususnya Angkatan Darat, Sosialis (PSI), dan intelektual pro Barat membentuk lingkaran awal Orde Baru memiliki kesamaan latar belakang dan tujuan dengan para mahasiswa terkait kritik terhadap kebijakan dan garis politik Sukarno. (Fatubun, 2019, p. 51).

Kudeta yang terjadi pada 1 Oktober menjadi momentum penting dalam menguatnya kerjasama antara angkatan darat dengan mahasiswa. G30S tidak hanya soal terbunuhnya perwira Angkatan Darat, melainkan beriringan dengan kenaikan harga dan usaha rezim Sukarno melindungi PKI yang dianggap dalang dalam peristiwa G30S. Angkatan darat tentu saja tidak dapat langsung menerjunkan kekuatan militer, karena berarti angkatan darat frontal melawan kepemimpinan Sukarno dan dapat merusak struktur politik yang ada. Mahasiswa menjadi solusi dalam usaha melemahkan Sukarno. Seminar anti Sukarno dan menuntut diadilinya Sukarno banyak digelar di kampus dengan dukungan secara tidak langsung dari Angkatan Darat. Kelompok mahasiswa dan dosen juga merasa kerjasama dengan Angkatan Darat diperlukan, mengingat Rezim Sukarno masih memiliki kendali cukup kuat terhadap militer (Gie, 2005, pp. 71-73).

Adanya dukungan Angkatan Darat dan Lingkaran Orde Baru dengan Gerakan Mahasiswa dapat dilihat dari terbentuknya KAMI sebagai pengganti PPMI yang telah dikuasai oleh kelompok mahasiswa kiri. Didirikannya KAMI tidak lepas dari peranan Syaref Thayeb sebagai Menteri PTIP waktu itu yang juga memiliki latar belakang

militer. Syaref Thayeb memberikan fasilitas tempat dan memberikan sponsor dalam pembentukan KAMI. Tokoh lainnya yang turut mendorong lahirnya KAMI ialah Manshuri Shaleh yang dikenal sebagai tokoh yang vokal mendukung Orde Baru, bahkan ia diketahui sering mendorong mahasiswa untuk mendukung Suharto dalam menggantikan Sukarno. Pada tahun 1967 ia menulis memorandum kepada MPRS untuk melengserkan Sukarno dan disetujui oleh MPRS yang kemudian direalisasikan dalam sidang istimewa MPRS tahun 1967 (Asnan et al., 2018, p. 310; Widyarsono et al., 2011, pp. 8–9).

Rapat KAMI pada bulan Desember tahun 1965 menjadi bukti lain kedekatan dan kerjasama tersebut. Rapat tersebut merupakan rapat yang diselenggarakan oleh KAMI guna menganalisis kondisi ekonomi. KAMI mengundang Brijen Ratu Alamsyah yang merupakan staf pribadi Suharto untuk bergabung dalam rapat dan memberitahukan pelbagai informasi seputar pemerintah. Kedekatan lainnya terbukti tatkala Sarwo Edhie sebagai tokoh RPKAD yang menumpas PKI memberikan sambutan dalam rapat besar yang diselenggarakan oleh KAMI di FKUI (Fakultas Kedokteran UI) pada bulan Desember tahun 1965 menjelang aksi Tritura. Rapat besar tersebut juga diiringi dengan seminar lain mengenai konsep *Trace* Baru membangun Indonesia baik secara sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Orde Lama. Konsep *Trace* Baru secara tidak langsung mengarahkan pada dukungan terhadap Orde Baru (Widyarsono et al., 2011, pp. 10–13).

Ketidak stabilan politik dan ekonomi mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan menuntut pertanggung jawaban pemerintah. Demonstrasi pada awalnya mengarah pada Waperdam Chaerul Shaleh yang disebut menjadi penggagas kenaikan harga. Demonstrasi juga dilakukan di depan DPR-GR oleh mahasiswa UI Salemba. Kejaksaan Agung tidak luput dalam aksi ini guna memprotes tuduhan yang diarahkan kepada KAMI dengan menyebut demonstrasi KAMI didalangi oleh Nekolim dan CIA. Tritura kemudian lahir dan menjadi tuntutan sekaligus slogan yang menjadi dasar perjuangan demonstrasi mahasiswa pada waktu itu. (Damayanti, 2022: 30)

Pemerintah dan PKI kemudian membuat gerakan tandingan dan menuding demonstrasi mahasiswa KAMI merupakan aksi makar. Pertikaian politik pun semakin memanas dengan puncaknya mahasiswa melakukan demonstrasi di depan gedung Menteri Subandrio untuk menuntut pertanggung jawaban politik. Demonstrasi pertama menasar para pejabat tinggi dengan Tritura sebagai tuntutan diiringi dengan slogan dan yel-yel. Aksi demonstrasi bukan lah satu-satunya yang dilakukan, melainkan terdapat aksi lain yaitu mogok kuliah. Demonstrasi kedua dilaksanakan pasca hari raya idul fitri, sekitar bulan Februari 1966 dengan agenda menolak Kabinet Dwikora karena terdapat menteri yang terlibat dalam Gestapu. Aksi Mahasiswa kemudian dibalas dengan aksi bersenjata oleh militer yang masih loyal terhadap Sukarno (Gie, 2005, pp. 7–11).

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa rupanya dikawal pasukan RPKAD di bawah Sarwo Edhie dan Rudy Manopo, salah satunya aksi demonstrasi di depan kantor Chaerul Saleh. Dukungan militer ini sangat diperlukan oleh Gerakan Mahasiswa guna melindungi jika ada konfrontasi terbuka dari kelompok komunis dan Sukarnois yang waktu itu mendukung Orde Lama. Petinggi KAMI juga menjalin kedekatan hubungan dengan beberapa tokoh militer yang dekat dengan lingkaran Orde Baru seperti Jenderal Nasution, Jenderal Kemal Idris, dan Jenderal HR. Dharsono. Dukungan dan kedekatan ini diwujudkan dengann diam-diam dan kerjasama non formal (Widyarsono et al., 2011, p. 11).

Suharto sempat secara personal mencari dukungan dari kalangan mahasiswa, salah satunya HMI tatkala melaksanakan kongres di Surakarta pada tahun 1966. Suharto secara pribadi memberikan sambutan dalam kongres tersebut yang secara materi memiliki dua inti bahasan, *pertama* rasa terimakasih Suharto kepada HMI yang membantu meruntuhkan Orde Lama dan *kedua* harapan Suharto supaya HMI dapat mendukung berkuasanya rezim Orde Baru yang menggantikan Orde Lama. (Firahman, 2010, pp. 47–48).

Dukungan Orde Baru tidak sebatas pada perlindungan dan pemberian fasilitas terhadap Gerakan Mahasiswa, tetapi juga dukungan terhadap pers mahasiswa yang memperkuat penyebaran informasi dan konsolidasi. Pers yang mendapat dukungan dari Orde Baru misalnya pers mingguan Mahasiswa Indonesia yang terbit di Bandung. Pers ini mendapatkan dukungan penuh dari lingkaran Orde Baru terutama kalangan militer seperti Brigjen H. Sugandhi yang diangkat sebagai penasehat pers mingguan Mahasiswa Indonesia. koran Mahasiswa Indonesia menjadi koran yang paling banyak melontarkan kritikan terhadap Orde Lama. Koran ini menjadi media yang turut membantu dalam pendirian Orde Baru karena media Mahasiswa Indonesia acapkali memberitakan hal-hal baik mengenai Orde Baru pada awal berdirinya rezim tersebut (Suwirta, 2018b, pp. 117–120).

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Masa Awal Orde Baru

Surat Perintah 11 September 1966 menjadi tonggak awal berdirinya Orde Baru. Surat ini memberikan Letjen Suharto mandat untuk mengkondisikan negara dan pemerintahan termasuk penentuan kebijakan, di antaranya membubarkan PKI dan melakukan perombakan besar pada Kabinet Dwikora. Kebijakan Suharto kemudian merambah sektor legislatif seperti Lembaga MPRS dan DPR-GR. Kedua lembaga tersebut kemudian dirombak dengan mengganti anggota yang terlibat dalam G30S. Sebanyak 62 anggota DPR-GR statusnya menjadi gugur alias keanggotaanya dicabut sehingga dikenal sebutan DPR-GR minus PKI (Zuhdi et al., 2021, pp. 191–202).

Koreksi dan perombakan Suharto di beberapa lembaga pemerintah menjadi jalan untuk naik ke panggung kekuasaan. Suharto mulai menanamkan pengaruh politik yang cukup kuat, setidaknya untuk membuat MPRS melakukan sidang istimewa di Istora Senayan pada bulan Juli 1966 yang memperkuat kedudukan Suharto dan mengoreksi Orde Lama. Sidang istimewa MPRS kemudian berakibat pada pembentukan Kabinet Ampera yang dibentuk untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan melaksanakan Dwi Dharma berupa mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi (Pusponegoro & Nugroho, 2010: 554).

Orde Baru mengusung konsep sekaligus jargon politik stabilitas keamanan, politik, dan pembangunan. Dwifungsi ABRI menjadi kebijakan yang merepresentasikan terciptanya kestabilan politik dan keamanan. Orde Baru secara politik pada awalnya membentuk basis massa yang terhimpun dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya yang diisi oleh para intelektual dan teknokrat. Sekretariat Golongan Karya ini memainkan peranan penting sebagai partner sipil Orde Baru, mengimbangi Partner militer (Hadi & Kasuma, 2012, pp. 40–42).

Orde Baru memiliki konsep dan semboyan politik, yaitu menjalankan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, sebab memandang Orde Lama telah melenceng dalam penerapan Pancasila dan UUD 45 yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Orde Baru kemudian melakukan berbagai manuver politik di parlemen melalui pemilihan umum tahun 1971 sebagai pemilu pertama era Orde Baru. Pemilu tersebut pada nyatanya menjadi ajang bagi Orde Baru dalam mengintervensi politik, misalnya menempatkan 100 orang ABRI sebagai wakil tetap di DPR dan pembentukan Golkar yang menjadi perpanjangan tangan Orde Baru. Suharto sebagai titik sentral Orde Baru kemudian membentuk Aspri (Asisten Presiden) dan Opsus (Operasi Khusus) yang menggandeng ABRI untuk menginfiltrasi parpol di luar Golkar dan melaksanakan kampanye terselubung untuk meningkatkan jumlah pemilih Golkar sehingga menjadikan Golkar meraih kursi terbanyak di parlemen (Hasan, 2014, pp. 476–477).

Cengkeraman politik Suharto kemudian melahirkan penyederhanaan partai, di mana partai-partai yang ada disederhanakan menjadi tiga sesuai dengan orientasi politik yang dianut. Orde Baru juga melarang parpol selain Golkar memiliki kantor cabang tingkat kecamatan dan desa dan menerjunkan operasi khusus yang mendorong ASN/PNS untuk menyalurkan suara ke Golkar. Guna memperkuat intervensi dan hegemoni politik Orde Baru terhadap institusi pemerintahan maupun pemerintahan tingkat daerah, Orde Baru menempatkan perwira-perwira ABRI sebagai alat kontrol dan menjaga loyalitas di setiap sendi pemerintahan. (Hasan, 2014, pp. 477–478).

Secara garis besar, manuver politik yang dilakukan rezim Orde Baru guna menciptakan stabilitas yang terwujud dalam enam format kebijakan politik. *Pertama*, menciptakan dan menerapkan konsep Dwifungsi ABRI; *kedua*, memusatkan kekuasaan ke tangan pemerintah pusat; *ketiga*, intervensi Suharto di Parlemen lewat pengangkatan beberapa anggota parlemen seperti DPR; *keempat*, menonjolkan pendapat dan ide dari partai Golkar sebagai representasi sipil; *kelima*, depolitisasi atau pengurangan partisipasi politik sipil; *keenam*, intervensi dan kontrol kuat Orde Baru terhadap kebebasan pers (Saptohadhi, 2011, pp. 127–128).

Kebijakan Pers Orde Baru sejatinya telah dimulai sejak Orde Baru mulai naik ke puncak kekuasaan, yaitu sekitar tahun 1966. Sejak tahun 1966 Suharto telah menutup/membredel berbagai pers yang diduga beraliran komunis dan menjadi *onderbouw* dari PKI. Bentuk pembatasan pers ini diatur dalam regulasi UU No. 11 tahun 1966 yang mengatur Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak. Pers Mahasiswa pada awalnya mendapatkan dukungan oleh Orde Baru. Orde Baru menganggap pers mahasiswa ini memiliki muatan politik yang anti Orde Lama dan pro terhadap Orde Baru (Eddyono, 2021, pp. 53–54).

Soe Hok Gie menuliskan bahwa Orde Baru memiliki prinsip menegakkan Kembali UUD45 dan Pancasila termasuk di dalamnya kebebasan dan kesempatan sipil dalam memberikan suara untuk penegakkan hukum. Awalnya Orde Baru membebaskan pers dan memulihkan kembali pers yang sempat mati pada masa Orde Lama. Secara sekejap masyarakat Kembali menaruh minat dan bergairah hingga berpartisipasi dalam kebebasan pers. Pers waktu itu telah membawa harapan kepada masyarakat, bahkan masyarakat termasuk ASN dan militer turut berlomba-lomba dalam mengisi kebebasan pers dengan memberitakan penyelewengan dan berbagai kasus yang terjadi di setiap instansi (Gie, 2005, pp. 78–84).

Perubahan lain yang dibawa oleh Orde Baru dan kemudian menjadi ciri khas adalah mengenai ekonomi dan pembangunan nasional. Suharto segera melakukan konsolidasi dengan para ekonom yang sebelumnya disingkirkan oleh Sukarno untuk merumuskan konsep pembangunan nasional. Suharto menjadikan pembangunan dan stabilitas sebagai slogan utama sekaligus pemikat hati rakyat. Pembangunan ekonomi yang dilakukan Orde Baru mulanya menyelesaikan masalah ekonomi warisan Orde Lama yang sangat buruk. Permasalahan ekonomi itu lah yang mendorong Orde Baru mengutamakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta stabilitas. (Dewi & Ba'in, 2021, p. 25).

Ekonomi Orde Baru secara periode dapat terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama adalah stabilisasi ekonomi dari ekonomi Orde Lama yang memprihatinkan (1966-1973). Fase kedua ketika terjadinya ledakan produksi minyak atau *Oil Boom* (1973-1982). Fase ketiga adalah fase deregulasi ekonomi (1983-1997). Masa stabilisasi ekonomi Orde Baru ditandai dengan percepatan arus modal, salah satunya lewat penghapusan monopoli Bank Indonesia sebagai penyedia kredit masyarakat. Salah satu wujud realisasi penyediaan kredit ini adalah program Bimas (Bina Masyarakat) di desa dan KIB (Kredit Investasi Biasa) sebagai kredit jangka menengah. Orde Baru menjalin hubungan dengan IMF dan para donatur Barat yang tergabung dalam IGGI (*Inter-Governmental Group of Indonesia*) yang memberikan bantuan finansial. Kebijakan moneter ini melahirkan penurunan inflasi hingga menyentuh angka 8.9% di tahun 1969. Kebijakan Ekonomi tersebut terbukti membantu pemulihan ekonomi masyarakat lebih cepat. Guna menumbuhkan perekonomian terutama perputaran uang dan meminimalisir monopoli Bank Indonesia, maka pemerintah mempermudah perizinan bagi tumbuhnya bank-bank swasta yang baru melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 603/M/IV/12/1968 (Abubakar et al., 2020, pp. 284–285; Fakhri et al., 2020, pp. 207–214)

Orde Baru berusaha melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengupayakan perbaikan dan stabilisasi ekonomi masyarakat. Orde Baru menjalankan sistem ekonomi terbuka, di mana swasta diberikan akses terhadap aktivitas ekonomi, salah satunya penyertaan modal asing yang di dalamnya termasuk mengizinkan bank swasta asing. Pelibatan bank swasta asing dikarenakan dapat menjamin aliran modal lebih banyak dan lebih profesional dalam menangani kredit, sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet yang pernah menjadi permasalahan besar pada masa Orde Lama. (Wuriyanti, 2013, pp. 431–433).

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/66 menegaskan secara formal pembangunan dan pembaharuan ekonomi yang dilakukan oleh Orde Baru. Usaha-usaha Orde Baru secara operasional mulai terlihat pada tahun 1968 misalnya penghapusan pajak impor, pemberlakuan impor beras untuk ketersediaan pangan, perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur serta upaya peningkatan penerimaan pajak. Orde Baru juga menetapkan pengawasan yang cukup ketat terkait penetapan harga-harga barang serta diadakannya penghematan pengeluaran negara dan juga penundaan utang luar negeri. Sejak tahun 1968 setelah berhasil menekan angka inflasi, pemerintah Orde Baru merealisasikan kebijakan ekonomi pembangunan periodik lima tahun yang disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). (Hasan, 2014, p. 478).

Repelita rupanya membutuhkan banyak biaya sehingga diperlukan bantuan seperti hibah, hutang, dan investasi dari asing mengingat terbatasnya modal dalam negeri. Penanaman modal dan investasi asing

kemudian difasilitasi dalam UUPMA yang disahkan pada tahun 1967. Bentuk keseriusan Orde Baru dalam memperoleh investasi modal asing diwujudkan dalam pembentukan Aspri (Asisten Presiden) yang melobi negara lain supaya mau menanamkan modalnya ke Indonesia. ketergantungan Orde Baru terhadap modal asing kemudian menimbulkan ketimpangan peran, di mana peranan pemerintah semakin kecil sedangkan peranan pemodal asing semakin besar (Hasan, 2014, pp. 479–480).

Retaknya Hubungan Mahasiswa dengan Orde Baru pada tahun 1970-1980

Kritik Mahasiswa Awal Perpecahan

Orde Baru menaruh harapan terhadap pemodal asing dalam rangka menciptakan iklim ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat menggerakkan ekonomi. Namun, masifnya masuknya modal asing ini ternyata memicu adanya iklim ekonomi yang tidak adil. Industri dan perusahaan asing mendapatkan beragam kemudahan, sedangkan pengusaha pribumi mendapatkan berbagai kesulitan. Ketidakadilan ini kemudian menimbulkan marginalisasi bagi pengusaha pribumi. Masuknya modal asing menciptakan ketergantungan, baik ketergantungan modal maupun ketergantungan hutang, dan industri. Ketergantungan Orde Baru yang begitu besar terhadap pemodal asing terutama Jepang kemudian mendapatkan respon dan kritikan dari masyarakat dan mahasiswa (Masitho, 2013, p. 121).

Protes-protes Mahasiswa pada awalnya mengkritik pola pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih mengutamakan pertumbuhan ketimbang pembangunan ekonomi. Mahasiswa menilai program dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Orde Baru tidak berdampak pada pemerataan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Kritik mahasiswa ini juga didukung dengan pendapat para akademisi di beberapa kampus yang menyebut ekonomi Indonesia seperti kondisi ekonomi di negara Amerika Latin. Mahasiswa menilai adanya kekuatan besar yang mempengaruhi jalannya ekonomi Indonesia di luar Bappenas, yaitu Lembaga ASPRI (Asisten Presiden) (W. Agustina, 2014, pp. 12–17).

Beberapa tahun sebelum meletusnya peristiwa Malari sudah ada bibit-bibit protes mahasiswa terutama oleh Mahasiswa UI di Jakarta dan Padjadjaran di Bandung. Mahasiswa memprotes adanya kenaikan BBM, inflasi, dan pengurangan anggaran pendidikan serta korupsi yang merajalela. Beberapa kelompok mahasiswa kemudian membentuk KAK (Kesatuan Anti Korupsi) sebagai bentuk protes dan kritik. Aksi protes mahasiswa kemudian hampir menimbulkan gesekan dengan tentara di Jakarta walau akhirnya sempat didamaikan oleh Ali Sadikin yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Protes mahasiswa kemudian mulai mengarah terhadap politik ketika menjelang pemilu 1971 di mana mahasiswa menolak adanya seruan untuk memilih Golkar. Protes Mahasiswa sempat mereda hingga kemudian muncul kembali pada tahun 1973 tatkala terdapat wacana mengenai rencana pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah). Mahasiswa memprotes terkait urgensi pembangunan TMII yang dinilai membuang anggaran dikala kesulitan ekonomi. Aksi ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah seperti penangkapan mahasiswa yang dinilai aktivis hingga penutupan beberapa surat kabar. Masalah mengenai TMII kemudian dibahas oleh pemerintah dalam rapat DPR dan disepakati bahwa pembangunan TMII tidak akan menggunakan dana atau anggaran negara (Jazimah, 2013, pp. 16–19).

Kasus lain yang tidak luput dari kritik mahasiswa terkait pemborosan anggaran salah satunya sambutan Gubernur Sulawesi Selatan dalam acara Dharma Wanita karena begitu banyak anggaran yang digunakan. Penyelenggaraan PON yang memakan anggaran sampai dua miliar juga dikritik mahasiswa karena dianggap terlalu berlebihan, begitupun kasus korupsi di Pertamina yang menysar pada Ibnu Sutowo. Kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial kemudian menimbulkan sebuah kerusuhan sosial yang mengarah kepada kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1973. Kerusuhan ini memang tidak melibatkan mahasiswa, akan tetapi kerusuhan ini menjadi tanda ketidakpuasan rakyat terhadap kesenjangan sosial dan kesulitan ekonomi (Padiatra, 2015, p. 108).

Aksi Mahasiswa dalam menolak masuknya modal asing dimulai sejak tahun 1973. Mahasiswa waktu itu menolak investasi asing dan mengambil momentum aksi demonstrasi tatkala kedatangan J.P. Pronk selaku ketua IGGI. Aksi protes mahasiswa menjelang Malari berawal dari aksi petisi 24 Oktober yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa UI. Petisi ini berisi tuntutan mengenai peninjauan kembali program pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru. Petisi 24 Oktober kemudian memberikan inspirasi bagi mahasiswa di ITB dan ITS untuk mengeluarkan aksi serupa. Aksi demonstrasi kemudian sempat meletus di sekitar Jl. Cendana yang bertujuan mengadakan dialog dengan Suharto namun usaha tersebut gagal lantaran Suharto tidak ada di kediamannya. Menjelang petaka 15 Januari, Gerakan Mahasiswa yang dikenal sebagai Angkatan 74 mencetuskan dan membacakan Tritura Baru yang kemudian berakhir dengan penangkapan beberapa mahasiswa oleh polisi (Padiatra, 2015, pp. 111–112).

Jepang menjadi sasaran utama kritik mahasiswa terhadap modal asing sebab besarnya pengaruh modal Jepang terhadap perekonomian Indonesia. Produk-produk Jepang membanjiri Indonesia mulai dari alat kebutuhan rumah tangga hingga produk mewah seperti mobil. Permasalahan lain yang mendorong mahasiswa menyatakan kritik adalah perilaku pengusaha Jepang yang semena-mena dan condong menjalin kerjasama bisnis dengan jaringan pengusaha tionghoa daripada penguasa pribumi. Faktor tersebut membuat Mahasiswa merasa tidak puas dan perlu untuk melakukan koreksi yang juga didukung dengan beberapa media pers, seperti koran *Merdeka* dan *Indonesia Raya* (Suwirta, 2018a, p. 79).

Klimaks kritik anti Jepang terjadi dengan meletusnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Peristiwa Malari masih berkaitan dengan demonstrasi di bandara Halim pada tanggal 14 Januari yang bertujuan menghadang dan melayangkan protes kepada PM Tanaka selaku Perdana Menteri Jepang. Aksi 14 Januari tersebut gagal dilakukan karena penjagaan ketat yang dilakukan oleh pihak aparat. Aksi 15 Januari kemudian menjadi aksi lanjutan guna menuntut pemerintah lebih merata dan adil dalam pembangunan ekonomi. Aksi 15 Januari dilakukan dengan aksi demonstrasi tenang yang hanya diisi dengan apel di Universitas Trisakti dan dilanjutkan dengan *long march* ke Monnas hingga akhirnya membubarkan diri secara tenang. Namun, aksi tersebut rupanya ditunggangi oleh golongan lain yang tidak diketahui asal usul serta tujuannya. Berbeda dari demonstran mahasiswa, aksi misterius ini justru melakukan berbagai tindakan pengrusakan seperti pembakaran ban, mobil Jepang, hotel, dan tempat usaha milik orang Jepang. Penjarahan toko-toko juga terjadi terutama milik non pribumi serta pengrusakan di Pasar Senen. (Suwirta, 2018a, pp. 85–86).

Adanya malapetaka 15 Januari beserta adanya kerusuhan mendorong pemerintah untuk menangkap para mahasiswa dan melakukan aksi pembredelan terhadap beberapa media pers seperti *Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi*, dan *Mingguan Senin* serta masih ada beberapa lagi. Tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah adalah menganggap pers telah melemahkan kekuatan nasional serta mendorong berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuduhan ini dilontarkan mengingat media yang dibredel memang sering mengkritik pemerintah terutama terkait korupsi, pemerataan pembangunan ekonomi serta Dwi Fungsi ABRI. *Harian Indonesia Raya* dan *Merdeka* bahkan lebih keras dalam memberitakan masa aksi misterius Malari sebagai masa aksi tunggangan yang ditunggangi oleh oknum politikus Orde Baru. (Jum'at & Firdaus, 2022, p. 42; Suwirta, 2018b, pp. 129–131).

Beberapa hari setelah terjadinya peristiwa Malari, pemerintah Orde Baru segera mengeluarkan pemberlakuan jam malam, larangan berkumpul lebih dari lima orang, dan menjaga ketat beberapa kampus dalam rangka mengantisipasi adanya gerakan lain pasca Malari. Presiden Suharto kemudian memberikan komentar terhadap adanya kerusuhan Malari dengan menyampaikan keprihatinan terhadap demokrasi yang tidak terbina dengan baik yang disampaikan tatkala pengangkatan Ketua Mahkamah Agung. Pemerintah selanjutnya menekan aktivitas politik mahasiswa seperti pengetatan aktivitas kampus terutama terkait kebebasan berekspresi dan aksi demonstrasi serta penyensoran yang semakin ketat terhadap pers (Jazimah, 2013, p. 29; Suwirta, 2018b, p. 132).

Kehidupan Kampus dan Gerakan Mahasiswa Pasca Malari

Kehidupan kampus dan mahasiswa mengalami dampak cukup besar dengan adanya peristiwa Malari. Pemerintah Orde Baru kemudian memperketat kontrol terhadap organisasi mahasiswa lewat Surat Keputusan Pemerintah No.028/1974 yang memberikan kewenangan terhadap perguruan tinggi untuk melakukan kontrol terhadap organisasi mahasiswa seperti Dewan Mahasiswa. Mahasiswa juga dipersulit dalam melakukan aktivitas di dalam kampus karena harus mendapatkan surat izin, begitupun aktivitas pers. Pemerintah Orde Baru juga dengan tegas melarang mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, bahkan diancam akan dihadapkan dengan aksi represi paksa oleh ABRI. (Jazimah, 2013, pp. 29–30).

Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pembangunan nasional merasa aksi demonstrasi dan kritik mahasiswa yang tidak diawasi serta dikontrol dianggap menghambat pembangunan yang sedang berlangsung. Mendikbud pada waktu itu, memiliki pandangan perlunya membina aktivitas mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan di kampus pun dikebiri fungsinya hanya sebatas sebagai pelayan kebutuhan mahasiswa. Buku *Perkembangan Sosial-Budaja dalam Pembangunan Nasional* menyatakan bahwa pemuda dan mahasiswa memiliki peranan cukup penting dalam perpolitikan Indonesia, hal ini menjadi tanda bahwa mahasiswa cukup mempengaruhi kebijakan Orde Baru. Besarnya pengaruh mahasiswa pasca peristiwa Malari memberikan pengalaman Orde Baru untuk mengontrol, , mentertibkan dan membina mahasiswa sehingga tidak lagi menjadi gerakan yang dianggap mengganggu stabilitas nasional (LIPI, 1970, pp. 157–158).

Daoed Joesoef selaku menteri pendidikan tahun 1978-1983 banyak mengeluarkan kebijakan yang menjadikan mahasiswa benar-benar diarahkan untuk tidak mengikuti politik praktis. Daoed Joesoef memiliki pandangan jika mahasiswa seharusnya difokuskan hanya pada masalah akademis. Aksi-aksi protes mahasiswa sejak 1971 seperti aksi golput, kritik terhadap Taman Mini, dan peristiwa Malari menyebabkan mahasiswa seharusnya hanya diberi kebebasan di ranah akademik, bukan politik praktis yang keluar dari marwah *civitas academica* (Mustafidah, 2016, p. 102).

Daoed Joesoef kemudian menerapkan kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang ditetapkan tahun 1979 dan sistem SKS dalam kehidupan kampus sebagai wujud pentertiban dan pengembalian marwah mahasiswa. Kebijakan NKK/BKK ditetapkan melalui surat keputusan No. 0156/U/1978 (NKK) dan surat keputusan No. 037/U/1979 (BKK). NKK/BKK berdampak pada pembubaran berbagai ormawa serta penyederhanaan fungsi organisasi mahasiswa yang masih dipertahankan seperti Senat Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa yang tujuannya menjauhkan kehidupan kampus dari politik praktis. Pemberlakuan NKK/BKK telah membatasi aktivitas mahasiswa hanya sebatas bidang minat, kesejahteraan mahasiswa, dan pengembangan mahasiswa secara akademis. Kebijakan lain yang diterapkan oleh Daoed Joesoef adalah sistem SKS (Satuan Kredit Semester), melalui sistem ini mahasiswa dipaksa menyelesaikan kuliah maksimal tujuh tahun (Asnan et al., 2018, pp. 351–353).

Dilihat dari kebijakan Daoed Joesoef maka tak bisa dilepaskan dari latarbelakang Daoed Joesoef yang merupakan anggota penting di CSIS, sebuah lembaga studi sebagai lembaga *Think Thank* Orde Baru. Daoed Joesoef dalam artikel-artikelnya banyak membahas mengenai pembangunan dan pendidikan serta kaitannya dalam pembangunan ekonomi. Daoed Joesoef dalam tulisannya berjudul *Persoalan Approach dalam Mempolakan Pendidikan Dalam Rangka Pembangunan Nasional* secara gamblang menyebutkan kaitan antara pendidikan, output tenaga kerja dan pembangunan nasional terutama ekonomi. (Joesoef, 1974, pp. 28–30).

Pembangunan menjadi fokus utama Orde Baru menjadikan Orde Baru merumuskan ulang definisi pemuda, dalam hal ini termasuk mahasiswa. Orde Baru menganggap semangat muda yang juga dimiliki mahasiswa seyogyanya disalurkan untuk kepentingan negara dalam kerangka pembangunan, bukan lewat politik praktis. Orde Baru juga menempatkan konsep kepemimpinan Jawa yang khas dengan corak Bapakisme, dimana Orde Baru memposisikan dirinya sebagai bapak dan mahasiswa sebagai anak. Gerakan Malari dan serentetan protes lainnya dianggap oleh Orde Baru sebagai Tindakan pembangkangan anak terhadap bapaknya sehingga perlu ditertibkan. (Yudhistira, 2020, pp. 156–158).

Simpulan

Mahasiswa tidak bisa dipisahkan dalam dinamika perubahan dan perkembangan bangsa. Mahasiswa sebagai kelompok terpelajar dan memiliki kepekaan sosial, kemudian membentuk gerakan mahasiswa yang bertujuan melakukan koreksi dan perubahan terhadap kondisi sosial yang ada. Gerakan Mahasiswa menjadi menarik dalam kerangka Orde Baru karena gerakan mahasiswa memiliki hubungan yang dinamis dengan Orde

Baru. Pada awal-awal pembentukan Orde Baru, gerakan mahasiswa menjalin hubungan harmonis namun di sisi lain pada pertengahan Orde Baru, gerakan mahasiswa justru mengalami tekanan dan Tindakan represif.

Dinamika hubungan antara Gerakan Mahasiswa dengan Orde Baru bukan tanpa alasan, terdapat berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Gerakan Mahasiswa dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan Orde Baru pada awal berdirinya Orde Baru karena didorong kepentingan yang sama, yaitu menyingkirkan pengaruh PKI dan menggulingkan Sukarno yang dianggap tidak becus dalam menjalankan pemerintahan. Hubungan Gerakan Mahasiswa dengan Orde Baru mulai merenggang sejak para mahasiswa melakukan kritik terhadap Orde Baru terutama soal Politik dan Ekonomi yang kemudian mencapai klimaks dalam peristiwa Malari. Aksi kritik dan demonstrasi mahasiswa dianggap sebagai penghambat pembangunan oleh Orde Baru. Bagi Orde Baru, Gerakan Mahasiswa harus ditertibkan dan dibina sehingga tidak lagi menjadi penghambat, melainkan penyokong pembangunan. Upaya Pentertiban dan Pembinaan ini diwarnai dengan tekanan, intervensi, pengekangan dan aksi represif yang menyebabkan hubungan antara Gerakan Mahasiswa dengan Orde Baru tidak lagi harmonis.

Daftar Pustaka

- Abdurakhman, Albar, M. W., Mulyatari, D., Pradono, A., Sodikin, M., & Maulida, F. H. (2019). *Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1918-2018*. Perpustakaan Nasional.
- Abubakar, A., Krisdiana, R., Hudiyanto, R. R., Handinoto, Pratiningrum, S. S., Balqis, R. H., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2020). *Dari Rimba Menjadi Kota Bank: Indonesia Dalam Evolusi Malang Raya*.
- Agustina, E. (2019). Soekarno, NASAKOM, Dan Buku Di Bawah Bendera Revolusi Sebagai Materi Ajar Pelajaran Sejarah SMA. *HISTORIA*, 3(1), 57–64.
- Agustina, W. (2014). *Massa Misterius Malari: Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde Baru*. Tempo Publishing.
- Asnan, G., Iskandar, M., Mulyana, A., Margana, S., & Pradjoko, D. (2018). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 1945-2018. In *Direktorat Sejarah*.
- Dewi, A. R. M., & Ba'in. (2021). Pers Dan Pemberitaan Sosial-Politik Orde Baru Dalam Sorotan Harian Sinar Harapan 1966-1986. *Journal of Indonesian History*, 10(1), 24–32.
- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 8(1), 53–60. <https://doi.org/10.22236/komunika.v8i1.5672>
- Fahrika, A. I., & Zulkifli. (2020). *Perekonomian Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*. Yayasan Barcode.
- Fakih, F., Adhisakti, L., Krisdiana, R., Rokhimah, G. S., Bounita, A., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2020). *Bersinergi Dalam Keistimewaan: Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*. Bank Indonesia Institute.
- Fatubun, B. (2019). *Gerakan Mahasiswa Jakarta 1966: Melawan Rezim Penguasa*. Universitas Sanata Dharma.

- Firahman, A. (2010). *Kongres HMI Ke-VIII Tahun 1966 Di Surakarta Pada Masa Transisi Pemerintahan Di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Gie, S. H. (2005). *Zaman peralihan* (p. 315).
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*, 1(1), 1-109.
- Hasan, Y. (2014). Situasi Politik Dan Ekonomi Pada Awal Pemerintahan Orde Baru. *Jurnal Forum Sosial*, VII(01), 475-481. <http://eprints.unsri.ac.id/3821/2/Isi.pdf>
- Jazimah, I. (2013). Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya*, 3(1), 9-34.
- Joesoef, D. (1974). Persoalan Approach Dalam Mempolakan Pendidikan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Analisis CSIS*, 3(2), 27-38.
- Jum'at, M. R., & Firdaus, D. W. (2022). Pembredelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. *Bihari*, 5(1), 35-44.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- LIPI. (1970). *Perkembangan Sosial-Budaja Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Djakarta.
- Maiwan, M. (2015). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 49-63. <https://doi.org/10.21009/jimd.v14i2.9105>
- Masitho, B. (2013). Dinamika politik pembangunan pada masa orde baru. *Perspektif*, 6(2), 118-123.
- Mustafidah, Z. (2016). Gerakan Mahasiswa Dan Kebijakan NKK/BKK 1978-1983. *Avatara*, 4(1), 99-106.
- Padiatra, A. M. (2015). Introduction to Malari: Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970-1974. *Jurnal Criksetra*, 4(8), 103-119.
- Saptohadhi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>
- Sholehuddin, A., & Kasdi, A. (2015). Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965. *Avatara*, 3(1), 69-81.
- Sidqi, S. Y. N. (2008). Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementarian). *Jurnal Hukum*, 15(1), 32-59.
- Suwirta, A. (2018a). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa Malari Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta. *Susurgalur*, 6(1), 73-98.
- Suwirta, A. (2018b). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia di Bandung, 1966-1974. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 113-136. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i2.13949>
- Widyarsono, T., Santoso, A., & Purwoko, D. (2011). Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998. In *Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan*.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/12775/1/Pengumpulan sumber sejarah lisan gerakan mahasiswa 1966 dan 1998.pdf>

Winata, L. (2017). NASAKOM Sebagai Ideologi Negara. *Avatara*, 5(3), 728–737.

Wuriyanti, A. (2013). Penyehatan Moneter Indonesia Awal Orde Baru (Merger Bank Swasta Nasional Indonesia Tahun 1971-1977). *Avatara*, 1(3), 428–439.

Yudhistira, A. W. (2020). *Dilarang Gondrong: Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an*. CV. Marjin Kiri.

Yulianti, N. R., Isawati, & Pelu, M. (2021). Pengaruh ASEAN Games IV Tahun 1962 Terhadap Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Candi*, 21(1), 51–68.

Zuhdi, S., Sunjayadi, A., Prameswati, D. P., Mohammad, G. S., & Alam, F. N. (2021). *Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1918-2020*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.